

Departemen Tenaga Kerja A.S.

Temuan-Temuan Bentuk Terburuk Pekerja Anak 2018

Indonesia

Pada tahun 2018, usaha Indonesia untuk menghilangkan bentuk terburuk pekerja anak mencapai kemajuan moderat. Pemerintah telah secara substantif menambah pembiayaan inspeksi tenaga kerja dari \$2,1 juta pada 2017 menjadi \$10,2 juta di mana dana secara spesifik dialokasikan untuk penegakan peraturan pekerja anak. Pemerintah juga melakukan 19.792 inspeksi tenaga kerja dan meneruskan kerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (ILO) untuk membuat sebuah database Perdagangan Manusia yang lengkap dan terintegrasi. Meski demikian, anak-anak di Indonesia masih terlibat dalam bentuk pekerja anak terburuk, termasuk eksplorasi seksual komersial, yang terkadang merupakan akibat dari perdagangan manusia. Anak-anak juga melakukan pekerjaan berbahaya di sektor perkebunan termasuk dalam produksi minyak sawit dan tembakau. Kementerian Ketenagakerjaan masih kekurangan sumber daya keuangan dan personel yang diperlukan untuk menegakkan hukum tenaga kerja anak secara memadai di seluruh negara. Selain itu, RUU Perlindungan Pekerja Domestik, yang dipertimbangkan sejak 2010, masih terus tidak menentu nasibnya di parlemen.

Berdasarkan laporan yang masuk, rekomendasi-rekomendasi tindakan telah diidentifikasi dan diharapkan akan membantu upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia.

Bidang	Rekomendasi Tindakan	Tahun-Tahun Rekomendasi
Kerangka Kerja Hukum	Memastikan agar penetapan kasus kejahatan perdagangan anak tidak memerlukan pembuktian ancaman, penggunaan kekuatan, dan pemaksaan.	2018
Penegakan	Mengizinkan inspektur tenaga kerja memeriksa pertanian dan rumah-rumah milik pribadi untuk mencari pelanggaran terkait pekerja anak.	2018
	Menambah jumlah inspektur tenaga kerja secara signifikan agar dapat memenuhi tuntutan kerja sesuai saran teknis ILO.	2010 – 2018
	Melembagakan pelatihan penyegaran untuk inspektur tenaga kerja mengenai hukum-hukum terkait pekerja anak, termasuk bentuk-bentuk terburuknya.	2017 – 2018
	Menerbitkan informasi penegakan hukum kriminal, termasuk jumlah investigasi yang dilakukan, pelanggaran yang ditemukan, penuntutan yang diupayakan, dan penjatuhan hukuman kejahatan terkait pekerja anak, termasuk bentuk-bentuk terburuknya.	2009 – 2018

Bidang	Rekomendasi Tindakan	Tahun-Tahun Rekomendasi
	Memastikan semua personel penegakan hukum kejahatan menerima pelatihan tentang peraturan pekerja anak.	2017 – 2018
	Memastikan pendanaan untuk inspeksi tenaga kerja juga membiayai kebutuhan infrastruktur, transportasi, dan bensin untuk membantu inspektur tenaga kerja melakukan pemeriksaan.	2018
Koordinasi	Memberikan dana yang cukup untuk Gugus Tugas Propinsi dan Distrik dan mewajibkan mereka memasukkan rekomendasi dari Gugus Tugas Nasional untuk Memerangi Perdagangan Manusia dalam rencana tindakan mereka untuk memusnahkan perdagangan perempuan dan anak-anak.	2016 – 2018
Program Sosial	Menerbitkan data pekerja anak usia 5 sampai 14 tahun. Meningkatkan upaya menghilangkan perintang pendidikan, termasuk pungutan sekolah dan menjamin semua anak memperoleh nomor identifikasi pelajar yang diterbitkan pemerintah sehingga mereka bisa sekolah.	2016 – 2018
	Melakukan penelitian untuk menentukan jenis kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak, termasuk di sektor perkebunan (minyak sawit), konstruksi, dan pekerja jalanan; informasi yang didapat bisa menjadi acuan dalam membentuk kebijakan dan program sosial.	2014 – 2018